

MEMPERKOKOH KETERKAITAN KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

Anih Sri Suryani

Analis Legislatif Ahli Madya anih.suryani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pertambahan penduduk dan tingginya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan permintaan terhadap pangan dan energi. Beban penyediaan pangan dan energi akan bertambah besar, baik dalam pasar internasional maupun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ketahanan pangan dan ketahanan energi menjadi isu utama dunia akhir-akhir ini. Produksi pangan dunia akhir-akhir ini terganggu akibat kekeringan, ditambah konflik antara Rusia dan Ukraina, dan diperparah dengan proteksionisme oleh para negara produksi pangan. Dampaknya pasokan bahan-bahan makanan di dunia pun susut. Hal ini meningkatkan risiko krisis pangan atau kelaparan di seluruh dunia.

Demikian juga dengan energi, Badan Energi Internasional (IEA) mengungkapkan bahwa dunia sedang dalam krisis energi untuk pertama kalinya. Krisis energi saat ini bisa menjadi titik balik dalam sejarah energi untuk mempercepat pengembangan dan pemanfaatan sumber energi bersih, termasuk untuk membentuk sistem energi yang berkelanjutan dan aman. Terlebih adanya fenomena pemanasan global yang dipicu oleh penggunaan energi fosil menjadikan sumber energi yang ramah lingkungan menjadi suatu keniscayaan. Program pemanfaatan biodiesel merupakan salah satu program prioritas dalam pengembangan energi baru dan energi terbarukan (EBT), demi mencapai target bauran energi 23% EBT di 2025 dan Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 atau lebih cepat.

Program mandatori biodiesel mulai diimplementasikan pada tahun 2008 dengan B2,5 yaitu kadar campuran biodiesel sebesar 2,5%. Kemudian, sejak 1 Januari 2020 program mandatori B30 mulai dilakukan dengan kadar pencampuran 30% biodiesel dan 70% minyak solar, hingga 2023 ini target campurannya mencapai 35% (B35). Pada tahun 2022 penyediaan biodiesel didukung oleh 22 badan usaha yang bergerak di bidang Bahan Bakar Nabati (BBN). Kapasitas produksi mereka tahun 2022 mencapai 14 juta kiloliter. Sementara itu, kebutuhan biodiesel tahun ini dengan adanya mandatori B35 sebesar 13.14 juta kilo liter (4,640 juta ton) atau naik dari tahun sebelumnya sebesar 11 juta kilo liter (3,89 juta ton). Dengan demikian, masih ada surplus produksi sehingga dapat dikatakan produksi biodiesel dalam keadaan aman.

Akan tetapi, sebagian besar produksi biodiesel tersebut berasal dari *Crude Palm Oil* (CPO). Untuk memenuhi produksi biodiesel sebesar 13,14 juta kiloliter dibutuhkan CPO sekitar 13,15 juta kiloliter (4,643 juta ton). Kondisi ini menyebabkan kekhawatiran bahwa upaya untuk mencapai target bauran energi dengan program mandatori biodiesel justru akan menyebabkan kerawanan pangan. *Pertama*, karena adanya pembagian CPO untuk kebutuhan minyak goreng dan untuk campuran bahan baku biodiesel. *Kedua*, potensi ekspansi dan alih fungsi lahan untuk pemenuhan stok biodiesel sehingga mengurangi ketersediaan lahan untuk tanaman pangan. HIngga saat ini, produksi CPO, baik untuk kepentingan pangan maupun pemenuhan energi, memang masih mencukupi. Namun tanpa ada kebijakan yang tepat, suatu saat nanti pertarungan pangan vs energi dimungkinkan terjadi.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya pada Pasal 15 menyatakan bahwa dalam hal ketesediaan pangan untuk kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan sudah tercukupi, kelebihan produksi pangan dalam negeri dapat dipergunakan untuk keperluan lain. Keperluan lain dalam hal ini termasuk untuk pemenuhan kebutuhan energi. Dengan demikian, prioritas utama minyak sawit sebagai sumber pangan adalah untuk kebutuhan konsumi. Dalam hal pemenuhan target bauran energi Indonesia dan mandatori biodiesel, penting kiranya pemerintah memikirkan dan mulai mengupayakan sumber bahan baku lainnya selain CPO. Indonesia sangat kaya dengan biomassa, banyak sumber nabati yang dapat digunakan sebagai campuran biodiesel, misalnya limbah/residu sawit (tandan buah kosong sawit, pelepah), limbah kayu, sekam padi, minyak jarak, limbah rumput, jerami kering, serta kayu. Selain itu, terdapat bahan baku biodiesel generasi 2 yang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, yakni *Used Cooking Oil* (UCO) atau minyak jelantah.

\tensi DPR

Pangan dan energi memiliki keterkaitan yang kuat, termasuk dampaknya terhadap perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Perhatian terhadap berkembang di dunia internasional. keterkaitan ini semakin Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 masih menerapkan perencanaan pembangunan ketahanan pangan dan energi, secara sendiri-sendiri. Komisi IV DPR RI perlu mengawasi pemerintah dalam hal kecukupan CPO untuk penyediaan minyak goreng dalam negeri, Peta jalan pemanfaatan minyak sawit untuk kebutuhan pangan dan energi juga perlu dikaji kembali agar lebih kompetitif sehingga target pemenuhan pangan dan energi nasional dapat berjalan beriringan.

Sumber

cnnindonesia.com, 22 Oktober 2022; esdm.go.id, 19 September 2022; *Kompas*, 14 Januari 2023.







EDITOR

@puslitbkd_official

Polhukam Simela Victor M. Prayudi Novianto M. Hantoro

Dewi Sendhikasari D. Sita Hidriyah Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

Ekkuinbang Sri Nurhayati Q.

Sulasi Rongiyati Rafika Sari Eka Budiyanti Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani Teddy Prasetiawan T. Ade Surya Masyithah Aulia A. Yosephus Mainake **Kesra** Yulia Indahri Trias Palupi K. Luthvi Febryka Nola

ryani Mohammad Teja setiawan Nur Sholikah P.S. rya Fieka Nurul A.